



- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- h. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengerusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- o. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun



- 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
- q. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
  - r. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 55);
  - s. Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 41);
  - t. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 74);
  - u. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
  - v. Keputusan Gubernur Bali Nomor 1357/01-F/HK/2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

## 2. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit, mengamanatkan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebagai salah satu Instansi Rumah Sakit di Provinsi Bali yang mempunyai tugas pokok tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat serta sebagai Unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional dalam menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, rehabilitasi dan gawat darurat psikiatri.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 1.357/01-F/HK/2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali memutuskan bahwa Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sejak 1 Januari 2013 menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan status Penuh. Tujuan pelaksanaan PPK-BLUD adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, sejalan dengan praktek bisnis yang sehat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan dan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk pelaksanaan kegiatan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali diperlukan perencanaan Program, Kegiatan dan Penganggaran yang berbasis kinerja. Dengan semakin meningkatnya kegiatan pada Rumah sakit Jiwa Provinsi Bali serta berdasarkan kewenangan yang diberikan sebagai PPK-BLUD berstatus penuh serta untuk mendukung kelancaran pelayanan pada tahun 2025, maka diperlukan ketersediaan anggaran yang memadai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan



Daerah. Dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, diterbitkanlah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Sehingga dari dasar Peraturan dan Keputusan tersebut diatas, maka Kode Program, kegiatan dan Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

Kode/Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN  
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI  
Kode/Kegiatan : 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan  
Pemerintahan Daerah  
Kode/Sub Kegiatan : 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum  
Kantor

Maksud dan tujuan dari Pelaksanaan Sub Kegiatan ini adalah menyediakan Jasa Tenaga Kesehatan dan Jasa Tenaga Non Kesehatan beserta iuran BPJS untuk menunjang Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Jiwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026.

Badan Layanan Umum Daerah merupakan Unit Pelaksana Teknis dinas/Badan Daerah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, sehingga dengan jelas di sampaikan bahwa BLUD memiliki misi sosial kepada masyarakat terutama masyarakat miskin (*pro poor*). Dari penjelasan ini kami sampaikan bahwa Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah Rumah Sakit Khusus Jiwa dimana pelayanan Kesehatan Jiwa yang dilakukan tersebut menjalankan misi Sosial, sehingga terpengaruh ke pendapatan Rumah Sakit. Biaya-biaya yang dikeluarkan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali untuk menjalankan Pelayanan Kesehatan Jiwa tidaklah sebanding dengan Pendapatan yang di dapat. Sehingga untuk mendukung Pelayanan Kesehatan Jiwa ini, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali membutuhkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Bali berupa Subsidi APBD. Subsidi Dana APBD Provinsi Bali ini salah satunya untuk menjalankan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

## B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat adanya sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ini adalah :

1. Masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan dapat menerima layanan kesehatan jiwa secara paripurna dan memuaskan.
2. Aparatur. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan dimana Rumah Sakit mampu memberikan pelayanan secara bermutu dan paripurna kepada seluruh pasien yang datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa.
3. Instansi Terkait

## C. Strategi Pencapaian Keluaran

### 1. Metode Pelaksanaan

Sesuai dengan Gambaran Umum diatas bahwa Pelayanan kesehatan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebagai kegiatan rutin Rumah Sakit dilaksanakan melalui



upaya Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif. Metode Pelaksanaan Kegiatan Promotif dan Preventif dilaksanakan melalui upaya Pelaksanaan Promosi dan Penyuluhan Kesehatan ke masyarakat baik melalui media cetak, elektronik serta penyuluhan langsung ke masyarakat merupakan pelayanan berbasis masyarakat (*Community base*). Sedangkan Metode Pelaksanaan Kegiatan Kuratif dan Rehabilitatif dilaksanakan di dalam area Rumah Sakit merupakan pelayanan kesehatan jiwa yang berbasis rumah sakit (*Hospital base*). Dalam mendukung Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Jiwa ini, dibutuhkan Biaya, Berupa Belanja Jasa Tenaga Kesehatan.

Metode Pelaksanaannya kegiatan ini dilaksanakan dengan Swakelola

## 2. JADWAL KEGIATAN

### a. Tahapan Pelaksanaan

Secara Umum, Tahapan dan waktu Pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Persiapan pelaksanaan
- Pelaksanaan Kegiatan
- Pelaporan Kegiatan

Tahapan Pelaksanaan dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ini dilaksanakan secara berkesinambungan selama 1 (satu) Tahun anggaran

### b. Matriks Pelaksanaan Kegiatan

NO	KEGIATAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. Persiapan Pelaksanaan												
	2. Pelaksanaan Kegiatan												
	3. Pelaporan												

## D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang bersumber dari Dana APBD Provinsi Bali Tahun 2026, selama periode bulan Januari s/d Desember 2026.

## E. Biaya Yang Diperlukan

Total anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian keluaran sebesar Rp.7.457.416.624,00 (Tujuh milyar empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus enam belas ribu enam ratus dua puluh empat rupiah), sesuai RAB terlampir.

Bali, 6 Pebruari 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**DIREKTUR**  
**dr. Ni Wayan Murdani, M.A.P**  
 Pembina (IV/a)



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
RKA-BELANJA  
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0005 Rumah Sakit Jiwa
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Bangli, Bangli, Kawan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN dan Non ASN Provinsi Bali
Alokasi 2025	
Alokasi 2026	Rp7.457.416.624
Alokasi 2027	

**Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	7.457.416.624
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai SOP	100 Persen

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan  
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Bali, Kecamatan Bangli, Kelurahan Kawan
Keluaran Sub Kegiat	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan  
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					7.457.416.624
5.1	BELANJA OPERASI					7.457.416.624
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					7.457.416.624
5.1.02.02	Belanja Jasa					7.457.416.624
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					6.903.317.464
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					6.387.400.000
	[ # ] Jasa Tenaga Kesehatan - Apoteker Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					120.000.000
	[ - ] Apoteker					120.000.000
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Spesifikasi : Apoteker Non ASN	24	Orang Bulan	5.000.000	0 %	120.000.000
	[ # ] Jasa Tenaga Kesehatan - Dokter Spesialis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					72.000.000
	[ - ] Dokter Spesialis					72.000.000
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Spesifikasi : Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis Non ASN	12	Orang Bulan	6.000.000	0 %	72.000.000
	[ # ] Jasa Tenaga Kesehatan - Dokter Sub Spesialis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					240.000.000
	[ - ] Dokter Sub Spesialis					240.000.000
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Spesifikasi : Dokter Sub Spesialis Non ASN	24	Orang Bulan	10.000.000	0 %	240.000.000
	[ # ] Jasa Tenaga Kesehatan - Dokter Umum/Dokter gigi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					120.000.000



	<b>[ - ] Dokter Umum/Dokter Gigi</b>					<b>120.000.000</b>
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Spesifikasi : Dokter Umum / Dokter Gigi Non ASN	24	Orang / Tahun	5.000.000	0 %	120.000.000
	<b>[ # ] Jasa Tenaga Kesehatan - Ners Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>4.034.400.000</b>
	<b>[ - ] Ners</b>					<b>4.034.400.000</b>
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Spesifikasi : Ners Non ASN	984	Orang / Tahun	4.100.000	0 %	4.034.400.000
	<b>[ # ] Jasa Tenaga Kesehatan - Tenaga Kesehatan lainnya D III Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (P</b>					<b>1.468.800.000</b>
	<b>[ - ] Tenaga Kesehatan lainnya ( D III ) Non ASN</b>					<b>1.468.800.000</b>
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Spesifikasi : Tenaga Kesehatan lainnya ( D III ) Non ASN	408	Orang / Tahun	3.600.000	0 %	1.468.800.000
	<b>[ # ] Jasa Tenaga Kesehatan - Tenaga Kesehatan lainnya S1/DIV Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>					<b>182.400.000</b>
	<b>[ - ] Tenaga Kesehatan lainnya ( S1/DIV ) Non ASN</b>					<b>182.400.000</b>
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Spesifikasi : Tenaga Kesehatan lainnya ( S1/DIV ) Non ASN	48	Orang / Tahun	3.800.000	0 %	182.400.000
	<b>[ # ] Tunjangan Bahaya Radiasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>22.800.000</b>
	<b>[ - ] Tunjangan Bahaya Radiasi</b>					<b>22.800.000</b>
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Spesifikasi : Tunjangan Bahaya Radiasi Tingkat II	24	Orang Bulan	950.000	0 %	22.800.000
	<b>[ # ] Tunjangan Hari Raya (THR) Tenaga Kesehatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>127.000.000</b>
	<b>[ - ] THR Tenaga Kesehatan</b>					<b>127.000.000</b>
	Belanja Tunjangan Hari Raya Non ASN Spesifikasi : THR Non ASN	127	Orang	1.000.000	0 %	127.000.000
<b>5.1.02.02.01.0026</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</b>					<b>454.958.732</b>
	<b>[ # ] Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan - D III Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI</b>					<b>72.000.000</b>
	<b>[ - ] Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan (D III)</b>					<b>72.000.000</b>
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kese...	24	Orang / Tahun	3.000.000	0 %	72.000.000
	<b>[ # ] Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan - S1/DIV Sumber Dana : PENDAPATAN AS</b>					<b>336.000.000</b>
	<b>[ - ] Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan (S1/DIV)</b>					<b>336.000.000</b>
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kese...	96	Orang / Tahun	3.500.000	0 %	336.000.000
	<b>[ # ] Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan - SMP/SMASMK Sumber Dana : PENDAP</b>					<b>35.958.732</b>
	<b>[ - ] Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan (SMP/SMASMK)</b>					<b>35.958.732</b>
	Belanja Jasa Tenaga Non ASN Spesifikasi : Jasa Tenaga Administrasi	12	Orang / Tahun	2.996.561	0 %	35.958.732
	<b>[ # ] Tunjangan Hari Raya (THR) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>11.000.000</b>
	<b>[ - ] THR Non ASN</b>					<b>11.000.000</b>
	Belanja Tunjangan Hari Raya Non ASN Spesifikasi : THR Non ASN	11	Orang	1.000.000	0 %	11.000.000
<b>5.1.02.02.01.0028</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum</b>					<b>24.000.000</b>
	<b>[ # ] Tambahan Uang Transport Sopir Direktur Rumah Sakit Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>24.000.000</b>
	<b>[ - ] Tambahan Uang Transport Sopir Direktur Rumah Sakit</b>					<b>24.000.000</b>
	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	12	Orang Bulan	2.000.000	0 %	24.000.000
	<b>[ # ] Tenaga Rumah Tangga Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>-</b>
	<b>[ - ] Tenaga Rumah Tangga Kantor</b>					<b>-</b>
	Belanja Jasa Tenaga Non ASN Spesifikasi : Jasa Tenaga Rumah Tangga Kantor	0	Orang / Tahun	2.996.561	0 %	-
	<b>[ # ] Tunjangan Hari Raya (THR) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>-</b>
	<b>[ - ] THR Non ASN</b>					<b>-</b>
	Belanja Tunjangan Hari Raya Non ASN Spesifikasi : THR Non ASN	0	Orang	1.000.000	0 %	-
<b>5.1.02.02.01.0033</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Supir</b>					<b>36.958.732</b>
	<b>[ # ] Tenaga Supir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>35.958.732</b>
	<b>[ - ] Tenaga Supir</b>					<b>35.958.732</b>
	Belanja Jasa Tenaga Non ASN Spesifikasi : Jasa Tenaga Sopir/Pengemudi	12	Orang / Tahun	2.996.561	0 %	35.958.732
	<b>[ # ] Tunjangan Hari Raya (THR) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>1.000.000</b>



	<b>[ - ] THR Supir</b>					<b>1.000.000</b>
	Belanja Tunjangan Hari Raya Non ASN Spesifikasi : THR Non ASN	1	Orang	1.000.000	0 %	1.000.000
<b>5.1.02.02.02</b>	<b>Belanja luran Jaminan/Asuransi</b>					<b>554.099.160</b>
<b>5.1.02.02.02.0005</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN</b>					<b>269.276.400</b>
	<b>[ # ] Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>269.276.400</b>
	<b>[ - ] Apoteker</b>					<b>4.800.000</b>
	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Apoteker Non ASN	24	Orang Bulan	200.000	0 %	4.800.000
	<b>[ - ] Dokter Spesialis</b>					<b>2.880.000</b>
	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis Non ASN	12	Orang Bulan	240.000	0 %	2.880.000
	<b>[ - ] Dokter Sub Spesialis</b>					<b>9.600.000</b>
	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Dokter Sub Spesialis Non ASN	24	Orang Bulan	400.000	0 %	9.600.000
	<b>[ - ] Dokter Umum/Dokter Gigi</b>					<b>4.800.000</b>
	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Dokter Umum / Dokter Gigi Non ASN	24	Orang / Tahun	200.000	0 %	4.800.000
	<b>[ - ] Ners</b>					<b>161.376.000</b>
	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Ners Non ASN	984	Orang / Tahun	164.000	0 %	161.376.000
	<b>[ - ] Tenaga Kesehatan lainnya D III</b>					<b>58.752.000</b>
	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Kesehatan lainnya ( D III ) Non ASN	408	Orang / Tahun	144.000	0 %	58.752.000
	<b>[ - ] Tenaga Kesehatan Lainnya (S1/DIV) Non ASN</b>					<b>7.296.000</b>
	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Kesehatan lainnya ( S1/DIV) Non ASN	48	Orang / Tahun	152.000	0 %	7.296.000
	<b>[ - ] Tenaga Rumah Tangga Kantor</b>					<b>-</b>
	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Jasa Tenaga Non ASN	0	Orang / Tahun	131.925	0 %	-
	<b>[ - ] Tenaga Supir</b>					<b>1.583.100</b>
	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Jasa Tenaga Non ASN	12	Orang / Tahun	131.925	0 %	1.583.100
	<b>[ - ] Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan (D III)</b>					<b>3.166.200</b>
	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Jasa Tenaga Non ASN	24	Orang / Tahun	131.925	0 %	3.166.200
	<b>[ - ] Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan (S1/DIV)</b>					<b>13.440.000</b>
	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kese...	96	Orang / Tahun	140.000	0 %	13.440.000
	<b>[ - ] Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan (SMP/SMA/SMK)</b>					<b>1.583.100</b>
	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Jasa Tenaga Non ASN	12	Orang / Tahun	131.925	0 %	1.583.100
<b>5.1.02.02.02.0006</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN</b>					<b>16.122.048</b>
	<b>[ # ] Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>16.122.048</b>
	<b>[ - ] Apoteker</b>					<b>288.000</b>
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Apoteker Non ASN	24	Orang Bulan	12.000	0 %	288.000
	<b>[ - ] Dokter Spesialis</b>					<b>172.800</b>
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis Non ASN	12	Orang Bulan	14.400	0 %	172.800
	<b>[ - ] Dokter Sub Spesialis</b>					<b>576.000</b>
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Dokter Sub Spesialis Non ASN	24	Orang Bulan	24.000	0 %	576.000
	<b>[ - ] Dokter Umum/Dokter Gigi</b>					<b>288.000</b>
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Dokter Umum / Dokter Gigi Non ASN	24	Orang / Tahun	12.000	0 %	288.000
	<b>[ - ] Ners</b>					<b>9.682.560</b>
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Ners Non ASN	984	Orang / Tahun	9.840	0 %	9.682.560
	<b>[ - ] Tenaga Kesehatan lainnya (D III)</b>					<b>3.525.120</b>
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Kesehatan lainnya ( D III ) Non ASN	408	Orang / Tahun	8.640	0 %	3.525.120
	<b>[ - ] Tenaga Kesehatan Lainnya (S1/DIV) Non ASN</b>					<b>437.760</b>
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Kesehatan lainnya ( S1/DIV) Non ASN	48	Orang / Tahun	9.120	0 %	437.760
	<b>[ - ] Tenaga Rumah Tangga Kantor</b>					<b>-</b>
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jasa Tenaga Non ASN	0	Orang / Tahun	7.192	0 %	-
	<b>[ - ] Tenaga Supir</b>					<b>86.304</b>
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jasa Tenaga Non ASN	12	Orang / Tahun	7.192	0 %	86.304



	<b>[ - ] Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan (D III)</b>					<b>172.800</b>
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kese...	24	Orang / Tahun	7.200	0 %	172.800
	<b>[ - ] Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan (S1/DIV)</b>					<b>806.400</b>
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kese...	96	Orang / Tahun	8.400	0 %	806.400
	<b>[ - ] Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan (SMP/SMA/SMK)</b>					<b>86.304</b>
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jasa Tenaga Non ASN	12	Orang / Tahun	7.192	0 %	86.304
<b>5.1.02.02.02.0007</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN</b>					<b>20.152.560</b>
	<b>[ # ] luran Jaminan Kematian bagi Non ASN</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>20.152.560</b>
	<b>[ - ] Apoteker</b>					<b>360.000</b>
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Apoteker Non ASN	24	Orang Bulan	15.000	0 %	360.000
	<b>[ - ] Dokter Spesialis</b>					<b>216.000</b>
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis Non ASN	12	Orang Bulan	18.000	0 %	216.000
	<b>[ - ] Dokter Sub Spesialis</b>					<b>720.000</b>
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Dokter Sub Spesialis Non ASN	24	Orang Bulan	30.000	0 %	720.000
	<b>[ - ] Dokter Umum/Dokter Gigi</b>					<b>360.000</b>
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Dokter Umum / Dokter Gigi Non ASN	24	Orang / Tahun	15.000	0 %	360.000
	<b>[ - ] Ners</b>					<b>12.103.200</b>
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Ners Non ASN	984	Orang / Tahun	12.300	0 %	12.103.200
	<b>[ - ] Tenaga Kesehatan lainnya (D III)</b>					<b>4.406.400</b>
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Kesehatan lainnya ( D III ) Non ASN	408	Orang / Tahun	10.800	0 %	4.406.400
	<b>[ - ] Tenaga Kesehatan Lainnya (S1/DIV) Non ASN</b>					<b>547.200</b>
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Kesehatan lainnya ( S1/DIV) Non ASN	48	Orang / Tahun	11.400	0 %	547.200
	<b>[ - ] Tenaga Rumah Tangga Kantor</b>					-
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jasa Tenaga Non ASN	0	Orang / Tahun	8.990	0 %	-
	<b>[ - ] Tenaga Supir</b>					<b>107.880</b>
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jasa Tenaga Non ASN	12	Orang / Tahun	8.990	0 %	107.880
	<b>[ - ] Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan (D III)</b>					<b>216.000</b>
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kese...	24	Orang / Tahun	9.000	0 %	216.000
	<b>[ - ] Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan (S1/DIV)</b>					<b>1.008.000</b>
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kese...	96	Orang / Tahun	10.500	0 %	1.008.000
	<b>[ - ] Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan (SMP/SMA/SMK)</b>					<b>107.880</b>
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jasa Tenaga Non ASN	12	Orang / Tahun	8.990	0 %	107.880
<b>5.1.02.02.02.0010</b>	<b>Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN</b>					<b>248.548.152</b>
	<b>[ # ] Jaminan Hari Tua bagi Non ASN</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>248.548.152</b>
	<b>[ - ] Apoteker</b>					<b>4.440.000</b>
	Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Spesifikasi : Apoteker Non ASN	24	Orang Bulan	185.000	0 %	4.440.000
	<b>[ - ] Dokter Spesialis</b>					<b>2.664.000</b>
	Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Spesifikasi : Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis Non ASN	12	Orang Bulan	222.000	0 %	2.664.000
	<b>[ - ] Dokter Sub Spesialis</b>					<b>8.880.000</b>
	Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Spesifikasi : Dokter Sub Spesialis Non ASN	24	Orang Bulan	370.000	0 %	8.880.000
	<b>[ - ] Dokter Umum/Dokter Gigi</b>					<b>4.440.000</b>
	Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Spesifikasi : Dokter Umum / Dokter Gigi Non ASN	24	Orang / Tahun	185.000	0 %	4.440.000
	<b>[ - ] Ners</b>					<b>149.272.800</b>
	Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Spesifikasi : Ners Non ASN	984	Orang / Tahun	151.700	0 %	149.272.800
	<b>[ - ] Tenaga Kesehatan lainnya (D III)</b>					<b>54.345.600</b>
	Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Kesehatan lainnya ( D III ) Non ASN	408	Orang / Tahun	133.200	0 %	54.345.600



<b>[ - ] Tenaga Kesehatan Lainnya (S1/DIV) Non ASN</b>					<b>6.748.800</b>
Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Kesehatan lainnya (S1/DIV) Non ASN	48	Orang / Tahun	140.600	0 %	6.748.800
<b>[ - ] Tenaga Rumah Tangga Kantor</b>					-
Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Spesifikasi : Jasa Tenaga Non ASN	0	Orang / Tahun	110.873	0 %	-
<b>[ - ] Tenaga Supir</b>					<b>1.330.476</b>
Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Spesifikasi : Jasa Tenaga Non ASN	12	Orang / Tahun	110.873	0 %	1.330.476
<b>[ - ] Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan (D III)</b>					<b>2.664.000</b>
Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kese...	24	Orang / Tahun	111.000	0 %	2.664.000
<b>[ - ] Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan (S1/DIV)</b>					<b>12.432.000</b>
Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kese...	96	Orang / Tahun	129.500	0 %	12.432.000
<b>[ - ] Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan (SMP/SMA/SMK)</b>					<b>1.330.476</b>
Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Spesifikasi : Jasa Tenaga Non ASN	12	Orang / Tahun	110.873	0 %	1.330.476
<b>Jumlah :</b>					<b>7.457.416.624</b>

Bali, 3 Pebruari 2025  
Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

dr. Ni Wayan Murdani, M.A.P

Pembahasan	
Tanggal	
Catatan	
	1
	2
Dst	

**Tim Anggaran Pemerintahan Daerah**

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

